RINGKASAN EKSEKUTIF

Nama Peraturan	:	PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN – BAB XII DANA PENSIUN
Nomor Peraturan	:	UNDANG-UNDANG No. 4 TAHUN 2023
Ditetapkan	:	12 Januari 2023
Diundangkan	:	12 Januari 2023
Mulai berlaku	:	12 Januari 2023

Pokok-pokok Penting isi UU P2SK :

DEFINISI (Pasal 134)

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. **Dana Pensiun** adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
2. **Dana Pensiun Pemberi Kerja** adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
3. **Dana Pensiun Lembaga Keuangan** adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh LJK tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri.
4. **Manfaat Pensiun** adalah manfaat yang diterima oleh peserta baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur.
5. **Peraturan Dana Pensiun** adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun bagi suatu Dana Pensiun.
6. **Program Pensiun** adalah setiap program yang mengupayakan Manfaat Pensiun bagi peserta.
7. **Program Pensiun Iuran Pasti** adalah Program Pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai Manfaat Pensiun.
8. **Program Pensiun Manfaat Pasti** adalah Program Pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau Program Pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti.
9. **Peserta** adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan mengikuti Program Pensiun.
10. **Usia Pensiun Normal** adalah usia normal ketika Peserta berhak mendapatkan Manfaat Pensiun.

11. **Disabilitas** adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan pengalamannya.
12. **Manfaat Pensiun Normal** adalah Manfaat Pensiun yang mulai dibayarkan pada saat Peserta telah mencapai Usia Pensiun Normal atau sesudahnya.
13. **Manfaat Pensiun Dipercepat** adalah Manfaat Pensiun yang dibayarkan apabila Peserta berhenti bekerja pada usia tertentu sebelum Usia Pensiun Normal.
14. **Manfaat Pensiun Disabilitas** adalah Manfaat Pensiun yang mulai dibayarkan pada saat Peserta berhenti bekerja karena Disabilitas.
15. **Pensiun Ditunda** adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Normal dan yang ditunda pembayarannya sampai dengan paling cepat pada saat Peserta memasuki usia tertentu sebelum Usia Pensiun Normal.
16. **Pemberi Kerja** adalah Setiap Orang yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
17. **Pendiri** adalah badan hukum yang membentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
18. **Mitra Pendiri** adalah Pemberi Kerja yang menyertakan sebagian atau seluruh karyawannya ke dalam Program Pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja.
19. **Bank Kustodian** adalah bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.
20. **Prinsip Syariah** adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
21. **Pengurus** adalah organ Dana Pensiun yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun untuk kepentingan Dana Pensiun, sesuai dengan maksud dan tujuan Dana Pensiun serta mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.
22. **Dewan Pengawas** adalah organ Dana Pensiun yang bertugas memberikan nasihat dan saran serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Pensiun kepada Pengurus.
23. **Pihak yang Berhak** adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun dalam hal Peserta meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta apabila Peserta tidak memiliki janda/duda atau anak.
24. **Otoritas Jasa Keuangan** adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

25. **Setiap Orang** adalah orang perseorangan, korporasi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya.
26. **Janda/Duda Peserta Program Pensiun** yang selanjutnya disebut Janda/Duda adalah istri/suami yang sah dari Peserta atau pensiunan yang meninggal dunia, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun.

RUANG LINGKUP USAHA DANA PENSIUN

JENIS DANA PENSIUN (Pasal 137)

1. Jenis Dana Pensiun terdiri atas:
  - a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (**DPPK**); dan
  - b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (**DPLK**).
2. **DPPK hanya dapat dibentuk oleh Pemberi Kerja** dan atas persetujuan OJK.
3. DPLK hanya dapat dibentuk oleh :
  - a. bank umum;
  - b. bank umum syariah;
  - c. perusahaan asuransi jiwa;
  - d. perusahaan asuransi jiwa syariah;
  - e. **manajer investasi**;
  - f. manajer investasi syariah; atau
  - g. lembaga lain yang diatur lebih lanjut dalam POJK Setelah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan, dan atas persetujuan OJK.

PROGRAM PENSIUN (Pasal 138)

1. **DPPK** dapat menyelenggarakan **PPMP dan/atau PPIP**.
2. **DPLK** hanya dapat menyelenggarakan **PPIP**.
3. Dalam hal tertentu, Dana Pensiun dapat memberikan **manfaat lain** sebagai tambahan dari Program Pensiun.

PEMBENTUKAN DANA PENSIUN (Pasal 139)

1. DPPK dapat didirikan untuk **lebih dari 1 (satu) Pemberi Kerja**.
2. Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sebagai suatu Dana Pensiun **sejak tanggal pengesahan pembentukan Dana Pensiun** oleh OJK.
3. Pengurus wajib **mengumumkan pembentukan Dana Pensiun** dengan menempatkan pengesahan OJK atas PDP **pada Berita Negara RI**.
4. Pemberi Kerja dapat menjadi **Mitra Pendiri** pada DPPK yang telah berdiri.

PENYELENGGARAAN DANA PENSIUN (Pasal 143)

1. Dana Pensiun wajib menerapkan:
  - a. **prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik**; dan
  - b. **manajemen risiko yang efektif**,dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

2. Dana Pensiun wajib dikelola dengan **mengutamakan kepentingan Peserta** serta **Pihak yang Berhak** atas Manfaat Pensiun.
3. **Pengurus dan Dewan Pengawas ditunjuk** oleh dan **bertanggung jawab** kepada **Pendiri**.
4. **Pendiri** dapat **memberhentikan** dan **mengubah susunan Pengurus dan Dewan Pengawas**.
5. **Pengurus dilarang merangkap jabatan** sebagai Pengurus Dana Pensiun lain, direksi, atau **jabatan eksekutif** pada badan usaha lain.
6. Pengurus dan Dewan Pengawas yang ditunjuk harus **memiliki kompetensi** dan **pengalaman yang memadai** terkait bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
7. Pengurus, Dewan, dan Dewan Syariah wajib **memenuhi ketentuan dan persyaratan kemampuan dan kepatutan** serta ketentuan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh OJK.

KEPESERTAAN DANA PENSIUN (Pasal 145)

1. Setiap karyawan pada Pemberi Kerja **berhak menjadi Peserta DPPK** apabila telah memenuhi syarat kepesertaan dalam PDP.
2. Dalam hal DPPK menetapkan adanya iuran Peserta, karyawan **berhak untuk tidak menjadi Peserta**.
3. Dalam hal karyawan memutuskan menjadi Peserta, karyawan harus menyatakan kesediaannya untuk dipotong upah atau gajinya setiap bulan.

USIA PENSIUN (Pasal 146, 320)

1. Usia Pensiun Normal untuk pertama kali ditetapkan **paling rendah 55 tahun**.
2. Usia Pensiun Normal **direviu dan ditetapkan secara berkala paling lama setiap 3 (tiga) tahun** sekali dengan mempertimbangkan angka harapan hidup dan kondisi makroekonomi.
3. **Penetapan Usia Pensiun Normal dalam PDP mengikuti ketentuan** sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) dan ayat (2)**.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 146** [*ketentuan Usia Pensiun Normal*] berlaku untuk setiap **orang yang mulai menjadi Peserta** Dana Pensiun **terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan**. [keterangan : 12 Januari 2023]

IURAN DAN MANFAAT PENSIUN (Pasal 148-164)

IURAN PROGRAM PENSIUN

1. Iuran Program Pensiun pada Dana Pensiun berupa:
  - a. iuran Pemberi Kerja; dan/atau
  - b. iuran Peserta.
2. Iuran Program Pensiun pada DPPK **tidak boleh hanya berupa iuran Peserta**.
3. Bagi DPPK yang menyelenggarakan PPIP, **besaran iuran Pemberi Kerja wajib ditetapkan dalam PDP**.

4. Dalam hal terdapat iuran Peserta pada DPPK, **besaran iuran Peserta ditetapkan dalam PDP.**
5. Bagi DPPK, iuran Pemberi Kerja wajib **dibayarkan secara berkala** dengan angsuran paling sedikit **1 (satu) kali setiap bulan.**
6. Dalam hal terdapat iuran Peserta, bagi DPPK, Pemberi Kerja merupakan wajib pungut iuran Peserta berdasarkan PDP yang dipungut paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.
7. Dalam hal Pendiri pada DPPK tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 5, **dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan secara berturut-turut**, Pengurus wajib memberitahukan hal tersebut kepada OJK.
8. Bagi DPPK, Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja **paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.**
9. Bagi DPPK, iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah **melewati 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo**, dinyatakan:
  - a. sebagai **utang Pemberi Kerja** yang dapat segera ditagih dan dikenakan imbal hasil tertentu yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud pada angka 8; dan
  - b. sebagai **piutang DPPK.**

Pendanaan DP

1. Dana Pensiun harus menjaga kondisi pendanaan agar berada **dalam keadaan dana terpenuhi (fully funded).**
2. Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP dinyatakan dalam keadaan dana terpenuhi apabila **iuran bulanan yang jatuh tempo telah disetorkan.**

Manfaat Pensiun

1. Peserta berhak atas **Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Disabilitas, Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Pensiun Ditunda.**
2. Dalam hal Peserta meninggal dunia, baik pada saat sedang mendapatkan Manfaat Pensiun maupun masih aktif bekerja, **Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Janda/Duda.**
3. Dalam hal Janda/Duda tidak ada, meninggal dunia, atau kawin lagi, **Manfaat Pensiun dibayarkan kepada anak.**
4. Dalam hal anak tidak ada, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada **pihak yang telah ditunjuk oleh Peserta.**
5. Hak terhadap setiap Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun **dilarang untuk digunakan sebagai jaminan pinjaman, dialihkan, dan/atau disita.**
6. Penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo, atau tindakan menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun akibat dilakukannya larangan **dinyatakan batal demi hukum.**

7. Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak yang dilakukan oleh Dana Pensiun **membebaskan Dana Pensiun dari tanggung jawab** atas pembayaran Manfaat Pensiun dimaksud.
8. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 7 berdasarkan pada **iktikad baik** dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Besarnya hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta PPIP merupakan himpunan:
  - a. iuran Peserta dan/atau iuran Pemberi Kerja;
  - b. dana awal Pemberi Kerja;
  - c. pengalihan dana dari Dana Pensiun lain; dan
  - d. hasil pengembangan.

Jenis Manfaat Pensiun

1. Peserta yang berhenti bekerja pada Usia Pensiun Normal atau setelahnya berhak atas **Manfaat Pensiun Normal**.
2. Peserta yang berhenti bekerja **paling cepat 5 (lima) tahun** sebelum Usia Pensiun Normal berhak atas **Manfaat Pensiun Dipercepat**.
3. Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki **masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun** berhak atas himpunan iuran Peserta yang bersangkutan ditambah **hasil pengembangannya**.
4. Peserta yang mengikuti Program Pensiun Iuran Pasti apabila berhenti bekerja setelah memiliki **masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun**, tetapi belum berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat, berhak atas Pensiun Ditunda yang besarnya sama dengan iurannya sendiri dan iuran Pemberi Kerja beserta hasil pengembangannya.

Pembayaran Manfaat Pensiun

1. Dalam hal Peserta berhak atas Pensiun Ditunda, hak atas Pensiun Ditunda dapat dibayarkan oleh:
  - a. DPLK; dan/atau
  - b. DPPK yang bersangkutan; atau
  - c. dapat dialihkan kepada DPLK dan/atau DPPK lainnya, dengan ketentuan yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.
2. Pemberi Kerja yang menanggung sebagian atau seluruh iuran Program Pensiun bagi karyawannya **dapat mengalihkan kepesertaan karyawannya** kepada DPLK atau DPPK lain.
3. Dalam hal Peserta turut menanggung sebagian iuran Program Pensiun, pengalihan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib dilakukan dengan terlebih dahulu memperhatikan pendapat dari Peserta.
4. Dana Pensiun dilarang melakukan pembayaran apa pun, kecuali **pembayaran yang ditetapkan dalam PDP**.
5. Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala.

6. Dana Pensiun dilarang melakukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta yang **belum mencapai usia paling rendah 5 (lima) tahun** sebelum Usia Pensiun Normal, kecuali untuk:
  - a. pembayaran Manfaat Pensiun kepada Janda/Duda atau anak;
  - b. pembayaran Manfaat Pensiun Disabilitas;
  - c. kondisi mendesak tertentu yang ditetapkan oleh OJK; dan
  - d. kondisi tertentu bagi Peserta yang bukan pekerja penerima upah pada badan usaha.
7. Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP, Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak dibayarkan secara berkala untuk periode tertentu.
8. Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala dapat dilakukan dengan cara:
  - a. **dibayarkan oleh Dana Pensiun**; atau
  - b. Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah.
9. Manfaat Pensiun bagi Peserta atau Pihak yang Berhak **dapat dibayarkan secara sekaligus** dengan ketentuan:
  - a. Peserta **meninggal dunia lebih dari 5 (lima) tahun** sebelum mencapai Usia Pensiun Normal;
  - b. **besarnya Manfaat Pensiun lebih kecil dari suatu jumlah tertentu** yang ditetapkan oleh OJK;
  - c. pembayaran Manfaat Pensiun **kepada pihak yang ditunjuk**; dan/atau
  - d. **adanya kondisi tertentu** yang ditetapkan oleh OJK.
10. PDP dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan **pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus** paling banyak **20%** (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun
11. **Peserta tidak dapat mengundurkan diri** atau **menuntut haknya** dari Dana Pensiun dalam hal **masih memenuhi syarat kepesertaan** sebagaimana diatur dalam PDP.

DANA TIDAK AKTIF (Pasal 166)

1. Dana Pensiun wajib **melakukan pencatatan tersendiri** atas dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
2. Sampai dengan jangka waktu tertentu, dana tidak aktif **dialihkan kepada balai harta peninggalan**.
3. Dalam jangka waktu tertentu setelah dialihkan kepada balai harta peninggalan, dana tidak aktif **dialihkan kepada Negara**.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan tersendiri dana tidak aktif diatur dalam POJK.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan dana tidak aktif dan jangka waktu tertentu diatur dalam PP.

ASET DANA PENSIUN DAN PENGELOLAANNYA (Pasal 167-170)

1. Aset Dana Pensiun dihimpun dari:
  - a. iuran Pemberi Kerja;
  - b. iuran Peserta;

- c. hasil pengelolaan aset;
  - d. pengalihan aset dari Dana Pensiun lain; dan/atau
  - e. pengalihan dana awal Pemberi Kerja.
2. Aset Dana Pensiun harus **dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas aset Pendiri.**
  3. Pengurus Dana Pensiun wajib melakukan pengelolaan aset Dana Pensiun **sesuai dengan ketentuan mengenai investasi** yang diatur oleh OJK.
  4. **Dengan persetujuan Pendiri dan Dewan Pengawas**, pengelolaan aset DPPK dapat dialihkan oleh Pengurus DPPK kepada lembaga keuangan yang memenuhi ketentuan yang diatur oleh OJK.
  5. Dalam hal pengelolaan aset DPPK dialihkan kepada lembaga keuangan, Pengurus DPPK wajib bertanggung jawab atas kepatuhan lembaga keuangan terhadap ketentuan mengenai pengelolaan aset dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
  6. OJK dapat mewajibkan Dana Pensiun menyimpan dan/atau menatausahakan sebagian atau seluruh aset Dana Pensiun pada Bank Kustodian.
  7. Aset Dana Pensiun yang disimpan pada Bank Kustodian hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah Pengurus.
  8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset diatur dalam POJK.
  9. DPPK **dilarang mengembalikan asetnya kepada Pemberi Kerja.**
  10. **Dana Pensiun dilarang:**
    - a. meminjamkan atau mengagunkan asetnya kepada pihak manapun, kecuali yang dikategorikan sebagai pengelolaan portofolio investasi;
    - b. menginvestasikan asetnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada **surat berharga yang diterbitkan**, atau pada **tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan** oleh:
      - 1) Pengurus, Pendiri, Mitra Pendiri, pengendali Pendiri atau Bank Kustodian;
      - 2) badan usaha yang lebih dari 25% sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari Pendiri, Mitra Pendiri, pengendali Pendiri, Pengurus, Bank Kustodian, atau serikat pekerja yang anggotanya adalah Peserta Dana Pensiun yang bersangkutan;
      - 3) perusahaan anak; dan/atau
      - 4) pejabat eksekutif dari badan sebagaimana dimaksud pada angka i dan angka ii, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar;
    - c. melakukan transaksi derivatif kecuali transaksi derivatif dalam rangka lindung nilai yang diatur oleh OJK; atau
    - d. memiliki instrumen derivatif kecuali instrumen derivatif yang didapatkan dari hasil kepemilikan instrumen lain yang diatur oleh OJK.
  11. Dana Pensiun wajib **menerapkan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik dan manajemen risiko yang efektif** dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

12. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 11 juga berlaku bagi lembaga keuangan yang mengelola aset DPPK.
13. **Penyewaan** atau **jual beli tanah, bangunan**, atau harta tetap lainnya milik Dana Pensiun kepada pihak sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b, hanya dapat dilakukan sepanjang **menggunakan harga pasar wajar**.
14. Harga pasar wajar atas:
  - a. jual beli; dan
  - b. penyewaan dengan nilai tertentu, untuk tanah, bangunan, atau harta tetap lainnya milik Dana Pensiun, **ditetapkan oleh penilai independen**.
15. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 14 tidak berlaku bagi investasi Dana Pensiun pada **instrumen keuangan yang tercatat** atau **diperdagangkan di Pasar Modal dan Pasar Uang**, dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai arahan investasi atau pengelolaan aset Dana Pensiun.

PENGATURAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN DP (Pasal 172-182)

Pengaturan

1. Pengaturan dan pengawasan atas Dana Pensiun dilakukan oleh OJK.
2. Pengaturan dan pengawasan meliputi **penyelenggaraan Program Pensiun**, termasuk penyelenggaraan atas manfaat lain, dan **pengelolaan aset Dana Pensiun**.
3. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan, OJK menetapkan POJK.

Pengawasan

1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, **OJK berwenang**:
  - a. menyetujui atau menolak pengesahan pembentukan Dana Pensiun;
  - b. menyetujui atau menolak pengesahan perubahan atas PDP;
  - c. membubarkan Dana Pensiun;
  - d. mewajibkan Dana Pensiun **menyampaikan laporan secara berkala**;
  - e. **melakukan pemeriksaan** terhadap Dana Pensiun dan pihak lain yang sedang atau pernah menjadi pihak terafiliasi atau memberikan jasa kepada Dana Pensiun;
  - f. **melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan** terhadap anggota Pengurus, anggota Dewan Pengawas, dan anggota Dewan Pengawas Syariah;
  - g. **menonaktifkan anggota Pengurus, anggota Dewas, anggota Dewas Syariah**, dan menetapkan pengelola statuter;
  - h. **memberi perintah tertulis** kepada:
    - 1) pihak tertentu untuk membuat laporan mengenai hal tertentu, atas biaya Dana Pensiun dan disampaikan kepada OJK;
    - 2) Dana Pensiun dan/atau pihak tertentu untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;
    - 3) Dana Pensiun untuk memperbaiki atau menyempurnakan sistem pengendalian intern untuk mengidentifikasi dan menghindari pemanfaatan Dana Pensiun untuk kejahatan keuangan; dan

- 4) Dana Pensiun **untuk menggantikan seseorang dari jabatan** atau **posisi tertentu**, atau **menunjuk seseorang dengan kualifikasi tertentu** untuk menempati jabatan atau posisi tertentu, dalam hal orang tersebut tidak kompeten, tidak memenuhi kualifikasi tertentu, tidak berpengalaman, atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;
  - i. **mengenakan sanksi** kepada Dana Pensiun, Pendiri, Mitra Pendiri, Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah; dan
  - j. melaksanakan kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemeriksaan dilakukan **secara berkala** dan/atau **sewaktu-waktu**.
3. Setiap Pendiri, Mitra Pendiri, Pengurus, Dewas, Dewas Syariah, dan lembaga atau profesi penunjang Dana Pensiun, serta pihak lain terkait dengan kegiatan Dana Pensiun wajib memberikan keterangan dan/atau data, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, catatan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan Dana Pensiun yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan.
4. Setiap orang yang pernah menjadi Pengurus, Dewas, Dewas Syariah, dan lembaga atau profesi penunjang Dana Pensiun, serta pihak lain terkait dengan kegiatan Dana Pensiun, wajib memberikan keterangan dan/atau data, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, catatan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan Dana Pensiun yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan.
5. **Setiap Orang dilarang:**
  - a. membuat atau menyebabkan adanya laporan, informasi, data atau dokumen Dana Pensiun yang **tidak benar, palsu, atau menyesatkan**;
  - b. menghilangkan, tidak memasukkan atau menyebabkan dihapuskannya suatu informasi atau data dalam buku catatan, laporan, atau dokumen Dana Pensiun; dan
  - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu informasi atau data dalam buku catatan, laporan, atau dokumen Dana Pensiun.
6. **Perintah tertulis** diberikan dalam hal OJK berkesimpulan bahwa Dana Pensiun:
  - a. menjalankan kegiatan usahanya dengan cara **tidak hati-hati** dan **tidak wajar**, atau **tidak sehat secara finansial**;
  - b. diperkirakan **akan gagal memenuhi kewajibannya**;
  - c. **melanggar ketentuan** peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun; dan/atau
  - d. **terlibat kejahatan keuangan**.
7. Dana Pensiun dan/atau pihak tertentu wajib mematuhi perintah tertulis.
8. **OJK dapat menonaktifkan** anggota Pengurus, anggota Dewas, dan/atau anggota Dewas Syariah, dalam hal:
  - a. berdasarkan informasi dari Dana Pensiun, diperkirakan Dana Pensiun tidak mampu memenuhi kewajiban;
  - b. menurut pertimbangan OJK, Dana Pensiun diperkirakan tidak mampu memenuhi kewajiban;

- c. menurut pertimbangan OJK, Dana Pensiun secara keuangan dinilai tidak sehat;
- d. menurut pertimbangan OJK, Dana Pensiun dimanfaatkan untuk memfasilitasi dan/atau melakukan tindakan kejahatan keuangan; atau
- e. menurut pertimbangan OJK, Dana Pensiun melakukan **kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan** peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Pelaporan

1. Dana Pensiun wajib **menyampaikan laporan berkala** mengenai kegiatannya kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh OJK.
2. Dana Pensiun wajib **mengumumkan kondisi keuangan dan perhitungan hasil usaha** secara transparan kepada Peserta.
3. Dana Pensiun wajib menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai hal yang timbul terkait kepesertaannya.
4. Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 minimal memuat **informasi mengenai jumlah dana yang telah terkumpul dan/atau proyeksi besaran manfaat yang akan diterima**.
5. Dana Pensiun wajib menyampaikan **informasi setiap perubahan PDP** secara transparan kepada Peserta.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman kondisi keuangan dan perhitungan hasil usaha, penyampaian keterangan, dan penyampaian informasi diatur dalam POJK.

PEMBUBARAN DP (Pasal 183-185)

1. **Pembubaran Dana Pensiun** terjadi dalam hal:
  - a. terdapat permintaan Pendiri kepada OJK;
  - b. Pendiri bubar; atau
  - c. berdasarkan penilaian OJK:
    - i. Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta dan Pihak yang Berhak;
    - ii. terhentinya iuran pada Dana Pensiun yang dapat membahayakan kondisi keuangan Dana Pensiun;
    - iii. Dana Pensiun tidak beroperasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak didirikan.
2. Dalam rangka pembubaran Dana Pensiun, OJK menetapkan:
  - a. pembubaran Dana Pensiun; dan
  - b. **likuidator** yang diajukan oleh Pendiri atau yang diajukan oleh likuidator Pendiri.
3. **Pengurus**, likuidator Pendiri, dan/atau pihak lain **dapat ditunjuk sebagai likuidator**.
4. **Dewan Pengawas tidak dapat ditunjuk** sebagai likuidator.
5. Sebelum proses likuidasi Dana Pensiun selesai, Pemberi Kerja tetap bertanggung jawab atas iuran yang terutang sampai pada saat Dana Pensiun dibubarkan

sesuai dengan ketentuan mengenai pendanaan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

6. Pada saat proses likuidasi, Dana Pensiun dilarang mengembalikan aset DPPK kepada Pemberi Kerja.
7. Setiap kelebihan kekayaan atas kewajiban pada saat pembubaran harus dipergunakan untuk meningkatkan Manfaat Pensiun bagi Peserta sampai jumlah maksimum yang ditetapkan oleh OJK.
8. Pendiri dan/atau pemegang saham dari Pendiri wajib bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penyelesaian proses likuidasi Dana Pensiun yang dilaksanakan oleh likuidator.
9. Likuidator wajib melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi Dana Pensiun kepada OJK.
10. Likuidator wajib mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi Dana Pensiun yang telah disetujui oleh OJK dalam Berita Negara Republik Indonesia.
11. **Status badan hukum** Dana Pensiun **berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman** hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada angka 10.

ASOSIASI DP (Pasal 186)

1. Setiap Dana Pensiun wajib menjadi anggota salah satu asosiasi Dana Pensiun yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
2. Asosiasi Dana Pensiun harus mendapat persetujuan tertulis dari OJK.

PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS PROGRAM PENSIUN (Pasal 190)

1. Pengelola Program Pensiun merupakan profesional yang wajib memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai.
2. Aset dan liabilitas Program Pensiun wajib dikelola dengan **menerapkan prinsip tata kelola yang baik** dengan minimal menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajiban.
3. Pengelolaan aset dan liabilitas Program Pensiun bertujuan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi pemangku kepentingan khususnya Peserta dan/atau Pihak yang Berhak memperoleh Manfaat Pensiun.
4. Setiap keputusan dan tindakan terkait pengembangan aset yang dilakukan oleh pengelola Program Pensiun wajib **didasarkan pada analisis pengembangan aset yang objektif, independen, dan rasional**.
5. Analisis pengembangan aset wajib didokumentasikan dan tertuang dalam **kertas kerja analisis yang memadai**.
6. Pengelola Program Pensiun yang menyelenggarakan PPIP wajib memberikan penjelasan kepada Peserta dan/atau Pemberi Kerja **mengenai pilihan alokasi aset** secara lengkap dan transparan.
7. Peserta dan/atau Pemberi Kerja **berhak menentukan pilihan alokasi aset** pada PPIP.

8. Pengelola Program Pensiun wajib menyampaikan **pengukuran kinerja** atas pengelolaan aset Program Pensiun kepada Peserta dengan ketentuan minimal:
  - a. dilakukan secara transparan dan lengkap;
  - b. memuat imbal hasil baik absolut maupun relatif; dan
  - c. disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset dan liabilitas Program Pensiun bagi Dana Pensiun diatur dalam POJK.

SANKSI ADMINISTRATIF TERKAIT DANA PENSIUN (Pasal 193)

1. OJK berwenang **menggunakan sanksi administratif** kepada Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :
  - a. Pasal 138 ayat (6) huruf a dan huruf b; [*pencatatan program manfaat lain hrs terpisah dan iuran Program Pensiun hrs lebih besar dari iuran manfaat lain*]
  - b. Pasal 139 ayat (6); [*mengumumkan pembentukan DP + SK pengesahan pd BNR*]
  - c. Pasal 142 ayat (5) [*hak peserta sebelum pengesahan perubahan PDP*]
  - d. Pasal 143 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); [*menerapkan TK DP yg baik, manris yg efektif, mengutamakan kepentingan peserta & pihak yg berhak, memenuhi UU P2SK & peraturan pelaksanaannya*]
  - e. Pasal 144 ayat (3), ayat (5), dan ayat (7); [*larangan rangkap jabatan, dewas syariah, hrs lulus fnp test*]
  - f. Pasal 147 ayat (1); [*merahasiakan data pribadi peserta*]
  - g. Pasal 149 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); [*besaran iuran PPMP, iuran PK PPIP hrs ditetapkan dlm PDP*]
  - h. Pasal 150 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); [*pemb.an iuran 1 x sebulan, PK wajib pungut, PK nunggak iuran 3 bln, mitra pendiri nunggak iuran 3 bln*]
  - i. Pasal 153 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5); [*PK hrs setor iuran tgl 15 tiap bulan*]
  - j. Pasal 158 ayat (4); [*besaran minimum hasil pengembangan PPMP*]
  - k. Pasal 160 ayat (4); [*pengalihan kepesertaan pd DP lain dg memperhatikan pendapat peserta*]
  - l. Pasal 166 ayat (1); [*pencatatan dana tidak aktif*]
  - m. Pasal 168 ayat (1) dan ayat (4); [*investasi hrs sesuai ket.an investasi, tj atas kepatuhan MI*]
  - n. Pasal 169 ayat (1), ayat (2) huruf c dan huruf d, ayat (3), dan ayat (4); [*larangan mengembalikan aset ke PK, larangan transaksi derivatif, memiliki inst. derivatif*]
  - o. Pasal 174 ayat (2) dan ayat (3); [*kewajiban memberikan ket.an, data, dok. ke OJK*]
  - p. Pasal 176 ayat (2); [*kewajiban mematuhi perintah tertulis OJK*]
  - q. Pasal 177 ayat (3) huruf b, ayat (4); [*pengurus wajib membantu pengelola statuter*]
  - r. Pasal 178 ayat (1), ayat (2), dan ayat (8); [*kewajiban pengelola statuter*]
  - s. Pasal 180; [*kewajiban pendiri atas hak keuangan peserta dlm hal terjadi kerugian*]
  - t. Pasal 181 ayat (1) dan ayat (2); [*kewajiban menyampaikan laporan berkala, kewajiban PPMP menyampaikan laporan aktuaris*]
  - u. Pasal 182 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4); [*mengumumkan kondisi keuangan & perhitungan hasil usaha, menyampaikan keterangan terkait kepesertaan, & perubahan PDP*]

- v. Pasal 184 ayat (3), ayat (7), dan ayat (8); [*larangan mengembalikan aset DP ke pendiri, tj pendiri atas penyelesaian likuidasi DP, kewajiban Dewas mengawasi penyelesaian likuidasi*]
  - w. Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2); [*kewajiban likuidator melaporkan ke OJK*]
  - x. Pasal 186 ayat (1); [*kewajiban menjadi anggota asosiasi DP*]
  - y. Pasal 190 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8); [*syarat pengelola program pensiun, menerapkan prinsip TK DP, analisis pengembangan aset, kertas kerja analisis pengembangan aset*]
2. **Sanksi administratif** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    - a. peringatan tertulis;
    - b. **larangan untuk menyelenggarakan program tertentu;**
    - c. **penurunan tingkat kesehatan;**
    - d. **larangan menjadi Pengurus, Dewas,** dan/atau DPS pada Dana Pensiun;
    - e. denda administratif; dan/atau
    - f. pembubaran.
  3. Dalam hal OJK menilai **kondisi Dana Pensiun membahayakan kepentingan Peserta** dan/atau Pihak yang Berhak, **OJK dapat mengenakan sanksi pembubaran** Dana Pensiun tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain.
  4. Pengenaan sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk sanksi administratif, besaran denda administratif, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam POJK.

KETENTUAN PIDANA TERKAIT DANA PENSIUN (Pasal 194-198)

1. Setiap Orang yang menjalankan Program Pensiun, **tidak memperoleh pengesahan** sebagai Dana Pensiun dari OJK, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 dan paling banyak Rp100.000.000.000,00.
2. Anggota Dewas, anggota Dewas Syariah, anggota Pengurus, dan pegawai Dana Pensiun yang dengan sengaja melakukan **pembayaran selain yang ditetapkan dalam PDP dan peraturan perundang-undangan** dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 dan paling banyak Rp100.000.000.000,00.
3. Anggota Dewas, anggota Dewas Syariah, anggota Pengurus, dan pegawai Dana Pensiun yang dengan sengaja **meminjamkan atau mengagunkan aset Dana Pensiun kepada pihak manapun** dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 dan paling banyak Rp100.000.000.000,00.
4. Anggota Dewas, anggota Dewas Syariah, anggota Pengurus, dan pegawai Dana Pensiun yang dengan sengaja **menginvestasikan aset Dana Pensiun** baik secara langsung maupun tidak langsung, **pada surat berharga yang diterbitkan, atau pada tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan** oleh pihak dan dilakukan tidak sesuai dengan ket.an Ps.170 dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 dan paling banyak Rp100.000.000.000,00.

5. Setiap Orang yang dengan sengaja:
- membuat atau menyebabkan adanya laporan, informasi, data atau dokumen Dana Pensiun yang **tidak benar, palsu, atau menyesatkan**;
  - menghilangkan, tidak memasukkan** atau **menyebabkan dihapuskannya** suatu informasi atau data dalam buku catatan, laporan, atau dokumen Dana Pensiun; dan/atau
  - mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan** suatu informasi atau data dalam buku catatan, laporan, atau dokumen Dana Pensiun

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 dan paling banyak Rp200.000.000.000,00.

MATRIKS KETENTUAN PIDANA TERKAIT DP DAN SANKSI

No.	Dasar Ketentuan	Perbuatan	Sanksi
1	Ps. 136	menjalankan Program Pensiun, tidak memperoleh pengesahan sebagai Dana Pensiun dari OJK	pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10 milyar dan paling banyak Rp100 milyar.
2	Ps. 161 (1)	dengan sengaja melakukan pembayaran selain yang ditetapkan dalam PDP dan peraturan perundang-undangan	pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10 milyar dan paling banyak Rp100 milyar
3	Ps. 169 (2) a	dengan sengaja meminjamkan atau mengagunkan aset Dana Pensiun kepada pihak manapun	pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10 milyar dan paling banyak Rp100 milyar
4	Ps. 169 (2) b	dengan sengaja menginvestasikan aset Dana Pensiun baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berharga yang diterbitkan, atau pada tanah dan/atau bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh pihak afiliasi	pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10 milyar dan paling banyak Rp100 milyar

5	Ps. 170	• Penyewaan atau jual beli tanah, bangunan, atau harta tetap lainnya milik Dana Pensiun kepada pihak afiliasi, hanya dapat dilakukan sepanjang menggunakan harga pasar wajar. • Harga pasar wajar atas: a. jual beli; dan b. penyewaan dengan nilai tertentu, untuk tanah, bangunan, atau harta tetap lainnya milik Dana Pensiun, ditetapkan oleh penilai independen.	pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10 milyar dan paling banyak Rp100 milyar
6	Ps. 175 a	membuat atau menyebabkan adanya laporan, informasi, data atau dokumen Dana Pensiun yang tidak benar, palsu, atau menyesatkan;	pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10 milyar dan paling banyak Rp200 milyar
7	Ps. 175 b	menghilangkan, tidak memasukkan atau menyebabkan dihapuskannya suatu informasi atau data dalam buku catatan, laporan, atau dokumen Dana Pensiun; dan/atau	pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10 milyar dan paling banyak Rp200 milyar
8	Ps. 175 c	mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu informasi atau data dalam buku catatan, laporan, atau dokumen Dana Pensiun	pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10 milyar dan paling banyak Rp200 milyar

KETENTUAN PERALIHAN TERKAIT DANA PENSIUN (Pasal 320)

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, bagi semua Dana Pensiun yang telah mendapatkan pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan, **pengesahan dari OJK dinyatakan tetap berlaku.**
2. Pelaksana tugas Pengurus pada DPLK menjadi Pengurus DPLK dan dewan komisaris dari Pendiri DPLK bertindak sebagai Dewan Pengawas DPLK sampai dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang Undang ini diundangkan.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 146** [*ketentuan usia pensiun normal*], **berlaku untuk Setiap Orang yang mulai menjadi Peserta Dana Pensiun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.** [tgl 12 Januari 2023]

KETENTUAN PENUTUP (Pasal 326, 330)

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan **peraturan pelaksanaan** dari:
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
  - b. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;**
  - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
  - e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
  - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
  - g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara;
  - h. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
  - i. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  - j. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
  - k. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
  - l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
  - m. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
  - n. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
  - o. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
  - p. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan;
  - q. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan;

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992** tentang **Dana Pensiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**